

Nomor : B-4337/KP.05.01/B2/2022
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Seleksi Terbuka JPT Pratama BKKBN

Jakarta, 23 November 2022

Yth.

**Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama/Sekretaris Pemerintah Provinsi**

(daftar terlampir)

di

tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dengan ini disampaikan bahwa BKKBN akan melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sehubungan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara/i. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan ketentuan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilihat di *website* <https://www.bkkbn.go.id/>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si

Tembusan:

Kepala BKKBN (sebagai laporan).

Lampiran

Nomor : B-4337/KP.05.01/B2/2022

Tanggal : 23 November 2022

A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
- ✓ 4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Kementerian Kesehatan;
15. Kementerian Sosial;
16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Perindustrian
18. Kementerian Perdagangan;
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Kementerian Perhubungan;
22. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Kementerian Pertanian;
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Kementerian Investasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

35. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Badan Informasi Geospasial;
3. Badan Intelijen Negara;
4. Badan Keamanan Laut;
5. Badan Kepegawaian Negara;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Badan Narkotika Nasional;
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS;
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
17. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
18. Badan Pusat Statistik;
19. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Badan Standarisasi Nasional;
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
23. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
24. Badan Siber dan Sandi Negara;
25. Komisi Pemilihan Umum;
26. Lembaga Administrasi Negara;
27. Lembaga Ketahanan Nasional;
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
29. Lembaga Sandi Negara;
30. Ombudsman Republik Indonesia;
31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

D. Sekretariat Pemerintah Provinsi di Indonesia

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Pemerintah Provinsi Aceh;
8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Pemerintah Provinsi Riau;
11. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
12. Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

13. Pemerintah Provinsi Jambi;
14. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Pemerintah Provinsi Lampung;
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
24. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Pemerintah Provinsi Gorontalo;
28. Pemerintah Provinsi Bali;
29. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Pemerintah Provinsi Maluku;
32. Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
33. Pemerintah Provinsi Papua;
34. Pemerintah Provinsi Papua Barat;
35. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
36. Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
37. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Pemerintah Provinsi Papua Selatan.